

Analisis Program Pendampingan Anak Berhadapan dengan Hukum Di Panti Sosial Marsudi Putra Antasena Magelang

**Oleh:
Sri Puji Astuti
NPM. 13144300045**

ABSTRAK

SRI PUJI ASTUTI. Analisis Program Pendampingan Anak Berhadapan dengan Hukum di Panti Sosial Marsudi Putra Antasena Magelang. Skripsi. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta, Agustus 2017.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis program pendampingan anak berhadapan dengan hukum di Panti Sosial Marsudi Putra Antasena Magelang.

Penelitian dilakukan di Salaman, Magelang, Jawa Tengah pada tahun 2017. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Subjek penelitian meliputi pekerja sosial, anak yang berhadapan dengan hukum dan orang tua atau wali. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan induktif. Proses berfikir induktif yakni berangkat dari permasalahan yang khusus ke umum sehingga dapat menghasilkan kesimpulan berdasarkan data yang diperoleh. Keabsahan data menggunakan triangulasi.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa program Anak berhadapan dengan Hukum dilakukan melalui rehabilitasi sosial. Adapun tahapan rehabilitasi sosial meliputi pendekatan awal, pengungkapan dan pemahaman masalah, penyusunan rencana pemecahan masalah, pelaksanaan pemecahan masalah, evaluasi, terminasi, dan rujukan serta bimbingan dan pembinaan lanjut. Pelaksanaan rehabilitasi sosial dimulai pukul 04.00 pagi sampai dengan pukul 09.00 malam. Pelaksanaan rehabilitasi sosial disesuaikan dengan kesepakatan di awal dengan pihak yang bersangkutan. Penanganan ABH dilakukan oleh pendamping baik pekerja sosial profesional maupun tenaga kesejahteraan sosial. Pendampingan ABH harus dilakukan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang ada. Kegiatan bimbingan dan pelayanan ABH sesuai jadwal yang telah dibuat Panti Sosial Marsudi Putra Antasena Magelang.

Kata kunci: Anak berhadapan dengan hukum, Rehabilitasi Sosial

ABSTRACT

SRI PUJI ASTUTI. Analysis of child facilitation program dealing with law in social home of Marsudi Putra Antasena Magelang. Thesis. Faculty of Teacher Training and Education PGRI University of Yogyakarta. August 2017.

The research aims to identification and analysis of child facilitation program dealing with law in social home of Marsudi Putra Antasena Magelang.

The research did in Salaman, Magelang Regency, Central Java Province on 2017. The research used to qualitative method. Research subject are social work, child dealing with law, and parents. Date collection techniques through observation, interview and documentation. Date analysis used to inductive. It thinking process that departs from specific to general problems that can generated conclusions based on data obtained. Data validity used to triangulation.

The results conclude that child facilitation program dealing with law are conducted through social rehabilitation. It stage include are initial approach, disclosure and understand of problem, prepare of problem solving plan, implementation of problem solving, evaluation, termination, referral as well as guidance and futther coaching. Social rehabilitation start at 04.00 am until 09.00 pm. Social rehabilitation adjust with initial agreement with parties concerned. Handling is carried out by companion of both professional social workers and welfare personel. Assistane done in accordance with existing procedure and regulations. Guidance and service activities according to schedule has been made by social home of Marsudi Putra Antasena Magelang.

Keywords : child are dealing with law, social rehabilitation

A. Pendahuluan

Anak merupakan suatu anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada setiap orang tua agar dirawat menjadi pribadi yang baik. Anak membutuhkan suatu perlindungan dan perhatian agar hak-hak dasar anak dapat terjamin. Salah satu hak dasar anak yaitu berupa perlindungan dari berbagai tindak kekerasan dan diskriminasi. Tindakan tersebut dapat dilakukan oleh pihak-pihak terdekat dari anak. Berkaitan dengan itu, perlunya perlindungan secara optimal terhadap anak. Kehidupan yang aman dan damai bagi anak ternyata belum terpenuhi di Indonesia. Salah satunya dikarenakan masih banyaknya tindak kejahatan di masyarakat. Tindak kejahatan menimbulkan berbagai masalah yang berdampak buruk. Hal ini terjadi apabila masyarakat menghalalkan segala cara untuk mendapatkan segala hal yang diinginkan. Bahkan saat ini, banyak anak yang rentan melakukan tindak kejahatan. Hal itu dikarenakan agar segala tujuan tercapai. Tindak kejahatan yang dilakukan oleh anak lebih dikenal dengan kenakalan. Berbagai perilaku anak yang menyimpang dikategorikan sebagai kenakalan. Hal ini dikarenakan pola pikir anak masih belum matang, keadaan emosi masih belum stabil dan lingkungan sekitar tempat tinggal anak sangat mempengaruhi kenakalan. Maka perlunya pengawasan orang tua.

Kenakalan anak dapat dikategorikan menjadi kenakalan biasa, kenakalan yang menjurus pada pelanggaran, dan kejahatan serta kenakalan khusus. Kenakalan anak dapat terjadi karena dua faktor baik internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi usia, jenis kelamin, dan kedudukan anak didalam keluarga. Faktor eksternal meliputi pendidikan, pergaulan, dan media massa. Kedua faktor tersebut dapat menyebabkan anak bermasalah dengan hukum baik sebagai korban, tersangka maupun sebagai saksi. Hal tersebut dapat terjadi, jika anak tidak bisa menyaring, membentengi iman, serta pengawasan orang tua yang kurang. Apabila anak terlibat dalam masalah hukum, maka anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dipersidangan. Anak juga akan diberikan bimbingan dan rehabilitasi serta diberikan bantuan hukum. Hal itu demi kepentingan anak. Selain kedua faktor tersebut, pengaruh sosial dan budaya dapat mempengaruhi tingkah laku kriminal anak. Perlindungan dan pengawasan kepada anak dapat dilakukan terutama di lingkungan keluarga. Hal ini dikarenakan perkembangan anak pertama kali di lingkungan keluarga. Maka keluarga harus menjalankan fungsinya dengan tepat. Selain itu, lingkungan sekolah dan masyarakat juga mempunyai pengaruh yang besar dikarenakan anak akan mengalami interaksi sosial di lingkungan tersebut. Di lingkungan sekolah, guru mempunyai tanggungjawab penuh pada anak.

Pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 2 telah disebutkan bahwa, "Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, dan penghargaan terhadap anak". Berkaitan dengan pasal tersebut, perlindungan anak merupakan salah satu hak asasi manusia yang harus dijamin. Jaminan terhadap perlindungan anak telah tercantum di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Selain itu, perlindungan harus berasaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Hak Anak. Hal ini dikarenakan nantinya anak akan menjadi generasi penerus yang mewarisi suatu bangsa. Maka dari itu, diharapkan dapat mewujudkan generasi penerus yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Di Indonesia, faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak kriminal anak seperti beragamnya informasi yang kontennya berisi negatif meliputi pornografi dan game online. Teknologi dan informasi yang berkembang sangat pesat serta mudah diakses menyebabkan anak mudah terpengaruh ke hal yang merugikan. Informasi yang sangat transparan mengakibatkan anak dapat mengakses dengan mudah tanpa pengawasan orang tua. Diusia yang belum stabil, anak sudah diberikan gadget berupa handphone. Segala informasi dapat diakses anak kapan saja dan dimana saja. Keingintauan anak yang tidak terbatas menyebabkan anak berusaha mencoba

hal baru yang belum diketahui. Hal tersebut dapat mendorong anak melakukan berbagai tindakan baik bersifat positif atau negatif. Berbagai perilaku anak yang diimbangi dengan pemikiran yang positif maka tindakan yang dilakukan akan baik sejalan dengan pemikiran anak. Sedangkan perilaku anak yang tidak diimbangi dengan pemikiran yang positif maka tindakan yang dilakukan anak akan cenderung negatif. Perilaku anak yang negatif dan tidak diimbangi keimanan serta penyaringan maka akan sangat rentan menyebabkan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH).

Berdasarkan bank data, jumlah klaster perlindungan anak terutama ABH dari tahun 2011 hingga 2016 mencapai 7698 kasus (KPAI, 2016). Rincian kasus ABH, pada tahun 2011 mencapai 695 kasus, tahun 2012 mencapai 1413 kasus, tahun 2013 mencapai 1428 kasus, tahun 2014 mencapai 2208 kasus, tahun 2015 mencapai 1221 kasus dan tahun 2016 mencapai 733 kasus (KPAI, 2016). Berdasarkan data tersebut, pada tahun 2011 sampai 2014 terjadi kenaikan sebesar 1513 kasus. Pada tahun 2014 sampai 2016 terjadi penurunan sebesar 1475 kasus. Selisih antara kenaikan dan penurunan sebanyak 38 kasus. Data kasus klaster perlindungan anak terutama ABH tertinggi terjadi pada tahun 2014 mencapai 2208 kasus dan terendah tahun 2011 mencapai 695 kasus. Berbagai kasus ABH harus ditangani dengan benar. Penanganan harus dilakukan sesuai prosedur. Hal tersebut agar kondisi anak dapat pulih.

Anak yang bermasalah dengan hukum tetap memiliki hak untuk dilindungi mulai dari tahap pemeriksaan sampai persidangan di pengadilan. Pendampingan dapat dilakukan oleh pengacara, psikolog, maupun pekerja sosial. Wajar apabila kenakalan anak dapat mendorong berbagai upaya peningkatan rehabilitasi sosial di masyarakat. Upaya tersebut diselenggarakan oleh lembaga dibawah naungan Kementerian sosial melalui berbagai program yang dicanangkan terutama pendampingan ABH. Pendampingan dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak. Pendampingan dilakukan secara baik tanpa adanya intimidasi dan diskriminasi. Pendampingan ABH harus dilakukan secara profesional dan sesuai peraturan yang ada. Pendampingan dapat dilakukan melalui rehabilitasi sosial. Hal ini agar anak nantinya mampu berinteraksi kembali dalam kehidupan masyarakat setelah mengalami suatu masalah. Berkaitan dengan hal tersebut maka di Indonesia diperlukan perlindungan, pengawasan, dan pendampingan anak baik di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Hal tersebut mendorong Peneliti untuk melakukan penelitian secara mendalam mengenai pendampingan kasus ABH di Panti Sosial Antasena Magelang.

B. Metode

Penelitian dilakukan di Panti Sosial Marsudi Putra Antasena Magelang. Lokasi penelitian terletak di Jalan Magelang-Purworejo km 14 Salaman Magelang. Penelitian akan diadakan pada bulan April-Juni 2017. Kondisi sosial masyarakat terutama di lokasi penelitian sangat mendukung bagi anak. Berkaitan dengan situasi sosial, maka peneliti dapat mengamati secara mendalam aktivitas ABH dan Pekerja sosial dalam melakukan pendampingan di panti tersebut. Sumber data dapat diperoleh melalui pekerja sosial, ABH, orang tua/wali serta berbagai data baik dari Panti Sosial Marsudi Putra Antasena atau internet yang berkaitan. Penentuan sumber data pada orang yang diwawancarai dilakukan secara purposive, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Berkaitan dengan hal tersebut, narasumber atau informan telah ditentukan oleh pihak yang berwenang di lokasi penelitian terkait dengan pertimbangan judul penelitian mahasiswa yang bersangkutan. Alasan memilih lokasi tersebut dikarenakan telah ada program yang diselenggarakan pemerintah terutama kementerian sosial untuk memberikan bimbingan dan penyuluhan melalui pendampingan ABH. Program tersebut dikhususkan bagi anak yang melakukan tindak pidana, hasil diversi, atau putusan pengadilan anak. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk mengidentifikasi dan menganalisis program pendampingan ABH di Panti tersebut.

Jenis penelitian dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif. Berkaitan dengan hal ini, peneliti berperan menjadi instrumen penelitian yakni sebagai alat pengumpul data. Jadi alat penelitian yaitu peneliti sendiri. Pemilihan informan untuk penelitian yakni seseorang yang telah mengetahui karakteristik ABH, pedoman pendampingan ABH melalui LPKS dan memahami Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yakni pekerja sosial, orang tua, serta ABH baik sebagai korban, pelaku, atau saksi. Penelitian dilakukan pada siang hari. Jadwal pelaksanaan penelitian disesuaikan dengan pekerja sosial yang berkaitan. Data yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri atas dua kategori, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer berkaitan dengan data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti (narasumber atau informan). Pada penelitian ini data primer dapat diperoleh melalui wawancara dengan pekerja sosial, anak yang sedang menjalani rehabilitasi sosial di Panti Sosial Marsudi Putra Antasena Magelang dan orangtua/wali. Data sekunder berkaitan dengan data yang diperoleh dari lembaga atau institusi tertentu seperti Badan Pusat Statistik, Departemen, dan lain-lain. Data sekunder dalam penelitian ini dapat diperoleh dengan menelaah berbagai artikel, literatur, jurnal, data statistik, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ABH.

Pengumpulan data didasarkan pada situasi dan kondisi yang sesuai tanpa adanya intervensi. Peneliti memasuki lapangan berhubungan dengan subjek yang diteliti setelah mendapat izin dari pihak panti. Teknik yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini antara lain observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi bertujuan untuk mengetahui program pendampingan anak berhadapan dengan hukum di Panti Sosial Marsudi Putra Antasena Magelang. Pengamatan dilakukan berdasarkan pedoman observasi dan selama observasi berlangsung dengan pencatatan untuk mempermudah laporan berupa proses pendampingan ABH, interaksi sosial ABH dengan para pekerja sosial, serta berbagai pelaksanaan kegiatan yang ada di Panti. Wawancara dilakukan melalui wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Pada wawancara terstruktur, pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan tertulis. Pada penelitian ini, setiap narasumber atau informan akan diberikan pertanyaan yang sama dan pengumpul data mencatat jawaban pertanyaan yang diajukan. Wawancara dilakukan kepada pekerja sosial, ABH dan orang tua/wali. Alat yang digunakan untuk bantuan seperti buku catatan untuk mencatat semua percakapan dengan sumber data, hp untuk merekam semua percakapan atas pembicaraan dan kamera untuk memotret peneliti yang sedang melakukan pembicaraan dengan narasumber atau informan. Adanya foto dapat meningkatkan keabsahan data. Berkaitan dengan itu, keabsahan data lebih terjamin. Jadi peneliti benar melakukan pengumpulan data. Dokumentasi dilakukan untuk memperkuat data yang diperoleh dari observasi. Dokumentasi dalam penelitian ini, dilakukan untuk mengetahui berbagai data yang berkaitan dengan pendampingan anak yang berhadapan dengan hukum.

Analisis data berkaitan dengan penyederhanaan data yang diinterpretasikan berdasarkan teori dan fakta yang ditemukan di lapangan. Pada penelitian kualitatif, analisis data dapat dilakukan baik waktu pengumpulan dan setelah selesai proses pengumpulan data. Skema proses analisis data menurut Miles dan Huberman meliputi data *reduction*, data *display*, dan *conclusion drawing/verification*. Pada reduksi data, peneliti dapat mengambil, memilah, merangkum data dari sumber data melalui teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti. Peneliti dalam mereduksi data memfokuskan pada bimbingan dan dampingan anak, kehidupan sosial anak yang direhabilitasi serta peran pekerja sosial yang melakukan pendampingan ABH di Panti Sosial Marsudi Putra Antasena Magelang. Pada penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam berbagai bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Pada penelitian kualitatif, penyajian data lebih sering menggunakan teks naratif. Data dalam penelitian ini didapat melalui proses wawancara dan pengamatan aktivitas di PSMP "Antasena" baik antara pekerja sosial

dan ABH. Selain itu, data yang diperoleh berupa dokumen tertulis baik jadwal kegiatan atau data ABH dari tahun ke tahun. Pada penelitian ini, penarikan kesimpulan termasuk bagian dari serangkaian proses penelitian secara menyeluruh. Verifikasi dilakukan dengan meninjau atau mengoreksi ulang catatan yang diperoleh dan pemaknaan yang dilakukan terhadap suatu data.

Proses berfikir Peneliti secara induktif yaitu berangkat dari permasalahan yang khusus ke umum. Peneliti menggunakan teknik analisis data induktif untuk mengetahui kevalidan hasil penelitian. Analisis induktif berarti penetapan kebenaran suatu hal atau perumusan umum mengenai suatu gejala dengan cara mempelajari kasus atas kejadian khusus yang berkaitan. Pada penelitian ini, Peneliti mengumpulkan data dari wawancara dengan ABH, pekerja sosial dan orang tua/wali. Setelah itu, Peneliti dapat menjelaskan sesuai dengan fokus penelitian. Peneliti dapat mencocokkan kebenaran data baik dari hasil yang diperoleh di lapangan atau dengan teori yang berkaitan. Peneliti dapat menjabarkan hasil penelitian untuk dijadikan sebagai kesimpulan. Teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian kualitatif ini menggunakan triangulasi. Teknik triangulasi dilakukan dengan mengecek data dari berbagai sumber yang telah diperoleh akan tetapi teknik atau caranya berbeda. Data yang didapatkan dari wawancara dapat dicek melalui observasi dan dokumentasi. Apabila data yang didapat berbeda, peneliti dapat berdiskusi dengan responden yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang benar. Pada penelitian ini, cara atau teknik pengecekan data dilakukan melalui observasi. Kegiatan observasi dilakukan dengan melihat kondisi sosial dan interaksi antara pekerja sosial dan ABH di PSMP "Antasena". Pengecekan data melalui dokumentasi dapat dilihat melalui data ABH yang masuk dipanti.

C. Hasil dan Pembahasan

Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) "Antasena" merupakan lembaga yang dipersiapkan untuk memberikan penanganan dan rehabilitasi sosial bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). Penanganan ABH dapat dilakukan oleh pendamping terutama pekerja sosial profesional dan tenaga kesejahteraan sosial. Pendampingan terhadap ABH dapat dilakukan melalui rehabilitasi sosial. Rehabilitasi sosial bertujuan agar anak dapat beradaptasi kembali dan berinteraksi dengan baik di lingkungan masyarakat. Selain itu, anak dapat mengembangkan berbagai potensi dan keahlian yang dimiliki. Program pendampingan ABH merupakan salah satu bukti perlindungan dari Pemerintah agar segala hak anak terjamin. Pendampingan terhadap ABH dapat dilakukan melalui rehabilitasi sosial. Tahapan pelayanan rehabilitasi sosial antara lain:

1. Pendekatan awal

Pendekatan awal berkaitan dengan kegiatan penjajagan awal. Pendekatan harus dilakukan tanpa kekerasan. Kegiatan yang dapat dilaksanakan pekerja sosial dalam tahap ini seperti konsultasi dengan pihak yang bersangkutan. Konsultasi bertujuan untuk mempersiapkan sosialisasi program pelayanan baik kepada masyarakat, kelompok sasaran program, atau pihak yang berpengaruh. Setelah proses sosialisasi, pekerja sosial dapat mengevaluasi proses sosialisasi program pelayanan. Selain itu, pekerja sosial dapat mengidentifikasi calon penerima pelayanan, memberikan motivasi, perumusan kesepakatan, dan penempatan calon penerima pelayanan, serta identifikasi sarana dan prasarana pelayanan. Adanya pendekatan hubungan pekerja sosial dengan pihak yang bersangkutan akan menjadi lebih akrab.

2. Pengungkapan dan pemahaman masalah

Tahap kedua yakni pengungkapan dan pemahaman masalah (Assesment). Kegiatan ini berupa proses kegiatan pengumpulan dan analisis data yang bertujuan untuk mengungkapkan dan memahami masalah, kebutuhan, dan sistem sumber penerima pelayanan. Berkaitan dengan itu, pekerja sosial dapat memahami dan mengetahui yang dibutuhkan anak serta dapat merencanakan

langkah yang ditempuh untuk mengatasinya dengan disesuaikan jangka waktu yang diputuskan oleh pengadilan. Pada tahap ini, pekerja sosial dapat menyusun rencana kegiatan assesment masalah, kebutuhan dan sistem penerima pelayanan. Setelah instrumen disusun, kegiatan assesment dilakukan. Kegiatan dilanjutkan dengan temu bahas hasil assesment masalah, kebutuhan dan sistem penerima pelayanan. Hasil laporan disusun dan dievaluasi.

3. Penyusunan rencana pemecahan masalah

Tahap ketiga yakni perencanaan pemecahan masalah (planning). Perencanaan pemecahan masalah merupakan proses perumusan tujuan dan kegiatan pemecahan masalah. Selain itu, menetapkan berbagai sumber daya seperti metode, teknik, sarana prasarana, waktu yang dibutuhkan. Hal tersebut agar tujuan tercapai. Tujuan yang dimaksud agar ABH dapat menolong dirinya sendiri. Segala kebutuhan dan sarana prasarana yang dibutuhkan ABH telah tersedia di PSMP "Antasena". Berbagai sarana prasarana yang ada sebagai fasilitas yang ada untuk ABH untuk membantu proses rehabilitasi sosial. Pada tahap ini, pekerja sosial dapat menyusun rencana kegiatan pemecahan masalah dengan ABH baik dalam bimbingan, pengembangan masyarakat, dan advokasi. Pada PSMP "Antasena", bimbingan yang dimaksud berupa fisik, psikososial, sosial, ketrampilan, pengembangan masyarakat, resosialisasi dan advokasi. Bimbingan fisik berkaitan dengan pemberian asrama untuk tempat tinggal ABH selama proses rehabilitasi serta makanan telah disediakan oleh panti. Berbagai kegiatan terkait bimbingan fisik seperti olahraga, senam, pengecekan kesehatan serta pengobatan. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan fisik ABH. Bimbingan psikososial berkaitan dengan pemberian pelayanan konseling pada ABH. Hal ini bertujuan agar ABH dapat mengatasi berbagai hambatan yang ada. Selain itu, ABH dapat memecahkan masalah sosial psikologis yang dihadapi. Bimbingan sosial berkaitan dengan kegiatan sosialisasi, rehabilitasi sosial, perlindungan, dan pendampingan pada ABH. Hal ini agar ABH dapat berinteraksi dengan baik di kehidupan bermasyarakat dan dapat memecahkan berbagai masalah yang dihadapi. Bimbingan ketrampilan berkaitan kegiatan vokasi untuk ABH. Bimbingan ketrampilan di PSMP "Antasena" dibedakan menjadi dua yakni pokok dan pilihan. Ketrampilan pokok meliputi perbengkelan, las, dan elektro. Ketrampilan pilihan meliputi komputer, kerajinan tangan, pangkas rambut, dekorasi, dan industri rumahan. Ketrampilan pokok didapat ABH di PSMP "Antasena" dengan terlebih dahulu mengikuti ujian vokasional. Hal itu dilakukan agar pekerja sosial dapat mengetahui minat dan bakat ABH. Selain itu, penentuan ketrampilan juga disesuaikan prospek ABH ke depan. Hal ini diberikan agar ABH mempunyai keahlian khusus sebagai bekal dalam hidup di masyarakat.

Bimbingan pengembangan masyarakat berupa kegiatan pemberian informasi, pengetahuan, sikap, dan ketrampilan kepada masyarakat. Hal ini agar masyarakat dapat berinteraksi dengan baik. Bimbingan resosialisasi berupa kegiatan mempersiapkan ABH agar mampu bersosialisasi dan beradaptasi baik dengan keluarga atau lingkungan masyarakat. adanya hal itu, ABH dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Bimbingan advokasi berkaitan dengan perlindungan pada ABH. Perlindungan yang dimaksud dapat melalui pemberian bantuan sosial, asuransi, pembelaan perkara, dan pencegahan penyalahgunaan. Pekerja sosial dapat melaksanakan temu bahas kasus untuk merencanakan pemecahan masalah ABH. Setelah merencanakan, pekerja sosial dapat mensosialisasikan kepada ABH dan mengevaluasi.

4. Pelaksanaan pemecahan masalah

Tahap keempat yakni pelaksanaan pemecahan masalah (intervention). Kegiatan ini sebagai penerapan terhadap rencana pemecahan masalah kepada ABH sesuai yang telah disusun. Kegiatan ini berupa pemeliharaan, pemberian motivasi, dan pendampingan kepada ABH. Pada tahap ini, pekerja sosial dapat melaksanakan pemeliharaan fisik pada ABH. Bahwa segala kebutuhan ABH di

PSMP “Antasena” yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari telah disediakan dan tidak dipungut biaya. Motivasi juga diberikan kepada ABH dalam berbagai kegiatan bimbingan. Kegiatan bimbingan di PSMP “Antasena” disesuaikan dengan jadwal yang telah ada. Pekerja sosial memantau aktivitas ABH di panti. Adanya hal itu, pekerja sosial dapat mengidentifikasi berbagai masalah atau hambatan yang didapat ABH dalam proses rehabilitasi. Pekerja sosial dapat mengevaluasi proses pemecahan masalah.

5. Evaluasi, terminasi, dan rujukan

Tahap kelima yaitu evaluasi, terminasi, dan rujukan. Evaluasi berkaitan dengan proses kegiatan yang bertujuan untuk mengetahui efektifitas pencapaian tujuan pemecahan masalah ABH. Pekerja sosial dapat menyusun rancangan dan instrumen evaluasi hasil pelayanan rehabilitasi. Setelah itu, pekerja sosial dapat melaksanakan evaluasi dan temu bahas hasil rehabilitasi serta menyusun laporan kegiatan evaluasi. Evaluasi di PSMP “Antasena” dilakukan selama tiga bulan sekali. Hal itu untuk perbaikan proses rehabilitasi kedepan.

Terminasi berkaitan dengan proses pemutusan hubungan rehabilitasi antara panti dengan ABH. Pada tahap ini, pekerja sosial dapat menyusun rencana kegiatan terminasi, mengidentifikasi kesiapan ABH, melaksanakan kegiatan terminasi, dan menyusun laporan kegiatan terminasi. Rujukan berkaitan dengan kegiatan merancang, melaksanakan, mensupervisi, mengevaluasi, dan menyusun laporan kegiatan rujukan program pelayanan kesejahteraan sosial. Pekerja sosial dapat melakukan kegiatan berupa menyusun rancangan kegiatan rujukan ABH kemudian dapat melaksanakannya. Pekerja sosial dapat mengidentifikasi berbagai masalah yang dihadapi dalam kegiatan rujukan. Setelah itu, pekerja sosial dapat menyusun laporan kegiatan rujukan.

6. Bimbingan dan pembinaan lanjut

Tahap keenam atau tahap terakhir yaitu bimbingan dan pembinaan lanjut. Pada tahap ini, pekerja sosial dapat merancang kegiatan bimbingan dan pembinaan lanjut terhadap eks ABH. Setelah itu, dapat melaksanakan kegiatan terhadap eks ABH baik melalui bimbingan dan penyuluhan sosial, bimbingan dan pendampingan secara individu, koordinasi dengan pihak yang bersangkutan, atau pemberian bantuan pengembangan usaha. Pekerja sosial dapat memantau perkembangan eks ABH di kehidupan bermasyarakat. Adanya hal itu, pekerja sosial dapat mengidentifikasi masalah yang dihadapi eks ABH. Setiap tahapan proses pelayanan rehabilitasi sosial dievaluasi oleh pekerja sosial. Hal ini untuk mengetahui seberapa efektifitas pelayanan rehabilitasi kepada ABH dan untuk kebaikan proses pelayanan mendatang. Pelayanan yang didapatkan ABH berupa pemberian motivasi, bimbingan, konseling dan terapi melalui pekerja sosial yang bertugas di Panti. Selain pendampingan di panti, kegiatan dilakukan diluar panti. Hal tersebut sebagai upaya preventif atau pencegahan. Penjangkauan dipilih berdasarkan lokasi yang berpotensi anak melakukan tindak pidana. Kegiatan penjangkauan dan pelayanan berdasarkan rujukan dari berbagai pihak baik kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan.

Kasus yang masuk di Panti sangat bervariasi. Kasus yang dimaksud meliputi pencurian, penganiayaan, pencabulan, dan tindak kekerasan. Selain dari putusan pengadilan, anak yang mendapatkan rehabilitasi sosial di panti dikarenakan dirujuk oleh berbagai pihak. Anak yang dirujuk di panti dikarenakan berbagai alasan seperti kenakalan anak yang menyebabkan orang tua susah dalam mendidiknya atau karena meresahkan warga masyarakat. Maka dari itu, anak ditipkan di panti untuk mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial. Setelah mengetahui proses pendampingan ABH melalui rehabilitasi sosial beserta kasusnya maka dapat diketahui bahwa terdapat faktor yang mempengaruhi anak untuk melakukan tindak pidana yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi lemahnya pengendalian diri anak, umur anak yang masih labil, dan kepatuhan terhadap norma-norma yang lemah. Faktor eksternal meliputi keadaan keluarga yang

brokenhome, ekonomi yang lemah, keterlantaran dalam proses pengasuhan dan kurangnya pengawasan, serta kuatnya pengaruh dari pihak lain.

Keluarga yang tidak harmonis, *brokenhome* menjadi salah satu faktor terbesar anak melakukan tindak pidana. Anak kurang mendapatkan perhatian dan pengawasan oleh orang tuanya. Anak yang sudah ditempatkan di PSMP “Antasena” akan mendapat rehabilitasi sosial sesuai jangka waktu yang diputuskan di pengadilan. Pelaksanaan rehabilitasi sosial minimal selama 3 bulan dan maksimal selama 8 bulan. Jadwal kegiatan di PSMP “Antasena” dimulai dari Pukul 04.00 WIB sampai dengan Pukul 21.00 WIB. Berbagai kegiatan telah tertera didalam jadwal kegiatan. Berkaitan dengan jadwal, bahwa pendampingan dapat dilakukan di luar jam. Artinya apabila ada anak yang melanggar peraturan maka pekerja sosial langsung menangani kasus tersebut hingga tuntas. Contohnya, apabila ada anak yang mencuri di dapur Panti, maka seluruh pekerja sosial akan terjun untuk mengusut secara tuntas kasus anak melalui case conference (introgasi). Semua anak di asrama terkait akan dikumpulkan dan diberikan pertanyaan secara mendalam demi tercapainya tujuan. Hal tersebut dilakukan agar anak jera dan tidak mengulangi perbuatan yang sama.

Kegiatan yang ada di PSMP “Antasena” sangat bermanfaat bagi anak. Anak harus mematuhi segala tata tertib yang ada dipanti apabila melanggar akan mendapatkan sanksi sesuai dengan kesepakatan. Selain itu, rehabilitasi terhadap anak dilakukan berdasarkan rujukan dari berbagai pihak. Kegiatan rehabilitasi sosial di PSMP “Antasena” sangat bersifat positif bagi ABH. Para orang tua yang anaknya mendapat pelayanan rehabilitasi sosial di panti sangat memberikan apresiasi kepada lembaga tersebut. Hal ini dikarenakan, setelah diberikan bimbingan dan pelayanan di panti anak dapat berubah dan tidak mengulangi perbuatannya. Anak juga mampu berinteraksi dan beradaptasi di lingkungan masyarakat dengan baik.

Program pendampingan ABH di PSMP “Antasena” telah dilaksanakan sesuai prosedur yang ada. Akan tetapi, dalam melakukan pendampingan terhadap ABH terdapat hambatan yang ditemui. Hambatan tersebut seperti kurangnya data informasi tentang anak. maka dari itu, perlunya waktu untuk mengetahui permasalahan anak. Pekerja sosial dapat melakukan pendekatan dengan anak agar bisa memecahkan solusi permasalahan yang hadapi sesuai batas waktu rehabilitasi anak yang telah disepakati. Selain itu, sebelum waktu rehabilitasi sosial selesai kadang anak kabur, jadi pekerja sosial beruaha secepatnya mencari anak tersebut. Adanya berbagai masalah tersebut, pekerja sosial di PSMP “Antasena” melakukan evaluasi yang dilakukan selama 3 bulan sekali yang diangkat ke forum. Setiap pekerja sosial harus mencatat segala aktivitas ABH dalam buku catatan harian. Bahwa setiap pekerja sosial diberikan tanggungjawab masing-masing sesuai ABH yang ditangani. Evaluasi dilakukan untuk perbaikan.

D. Kesimpulan

Program pendampingan ABH di PSMP “Antasena” dilakukan melalui rehabilitasi sosial. Berdasarkan hasil kajian penelitian, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tahap rehabilitasi sosial yang dilakukan meliputi pendekatan awal, pengungkapan dan pemahaman masalah, penyusunan rencana pemecahan masalah, pelaksanaan pemecahan masalah, evaluasi, terminasi, dan rujukan serta bimbingan dan pembinaan lanjut.
2. Pelaksanaan rehabilitasi sosial ABH di PSMP “Antasena” dimulai pukul 04.00 sampai dengan pukul 21.00 WIB.
3. Pelaksanaan rehabilitasi sosial disesuaikan dengan kesepakatan di awal dengan pihak yang bersangkutan.
4. Penanganan ABH dilakukan oleh pendamping baik pekerja sosial profesional maupun tenaga kesejahteraan sosial sesuai dengan prosedur dan peraturan yang ada.

5. Kegiatan bimbingan dan pelayanan ABH sesuai jadwal yang telah dibuat oleh pihak PSMP "Antasena".

Jadi, program pendampingan ABH ini adalah program dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Tujuan akhir dari program penanganan terhadap ABH untuk membantu agar mampu membuat keputusan sendiri (help people to help themselves).

E. Daftar Pustaka

Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar dan Beberapa Komentar)*. Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset

Ario Panco Wiguno. 2013. "Kajian victimologi terhadap anak sebagai korban tindak pidana kesusilaan". *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, (Online), Volume 1, Edisi 1, (<http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/LO/article/view/5624>., diunduh 5 Mei 2017)

Ekaputra, M. dan Khair, A. 2010. *Sistem Pidana di dalam KUHP dan Pengaturannya menurut Konsep KUHP Baru*. Medan: USU Press

Frans H Winarta. 2009. *Suara Rakyat Hukum Tertinggi*. Jakarta: Kompas Media Nusantara

Hadari Nawawi. 2007. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: UGM Press

Hikmat Mahi. 2011. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Juliansyah Noor. 2012. *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana

Kansil, CST. dan Kansil, Christine ST. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta

KPAI. 2016. *Data Kasus berdasarkan Klaster Perlindungan Anak 2011-2016*. (Online). (<http://www.bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-per-tahun/data-kasus-berdasarkan-klaster-perlindungan-anak2011-2016>), diunduh 20 Januari 2017

Laurensius Arliman S. 2015. *KOMNAS HAM DAN PERLINDUNGAN ANAK PELAKU TINDAK PIDANA*. Yogyakarta: Deepublish

M.N. Djamil. 2013. *Anak Bukan Untuk Di Hukum: Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*. Jakarta: Sinar Grafika

Moleong, L.J. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya

Mudzakkir. 2010. *Laporan Akhir Penulisan Karya Ilmiah Tentang Analisis Atas Mekanisme Penanganan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kesusilaan*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI

Muhammad Azil Maskur. 2012. "Perlindungan Hukum terhadap Anak Nakal (Juvenile Delinquency) dalam Proses Acara Pidana Indonesia". *Jurnal Ilmu Hukum*, (Online), Volume 7, No. 2, (<http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta>), diunduh 6 Januari 2017)

Paramitha Dhatu Anindyajati. 2013. "Status Identitas Remaja Akhir: Hubungannya dengan Gaya Pengasuhan Orang Tua dan Tingkat Kenakalan Anak" (Online), Volume I, No. 2, (<http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/article/3483/17/article.pdf>., diunduh 6 Juni 2017)

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial Anak Yang Berhadapan dengan Hukum oleh Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Reinal Pinangkaan. 2013. "Pertanggungjawaban Pidana dan Penerapan Sanksi dalam Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia". *Lex Crimen*, (Online), Volume II, No. 1, (<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/996>, diunduh 27 Mei 2017)

Setya Wahyudi. 2011. *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing

Soeroso, R. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika

Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta

_____. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta

_____. 2015. *Metode Penelitian Tindakan Komprehensif (Untuk Perbaikan Kinerja & Pengembangan Ilmu Tindakan)*. Bandung: Alfabeta

Sumadi Suryabrata. 2012. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers

Syamsu Yusuf. 2002. *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*. Bandung: Remaja Rosdakarya

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002